BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 262 /KPTS/IV.01/2018

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu ditetapkan status penggunaan barang milik daerah oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam hal barang milik daerah tersebut dibangun atau berada pada tanah dan/atau bangunan dalam penguasaan Pengguna Barang, maka barang milik daerah tersebut dicatat dalam Daftar Barang Milik Pengguna, kecuali ditentukan sebagaimana diktum Kesatu di atas;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Bappeda	
6	B. Umum	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

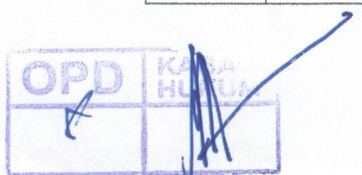
LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 262 /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : 14 Februari 2018

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

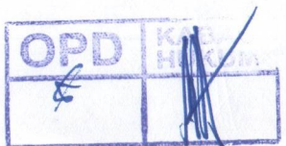
NO.	DAFTAR BARANG MILIK DAERAH	OPD	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 SEKRETARIAT DAERAH
2.	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 SEKRETARIAT DPRD
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN	INSPEKTORAT KABUPATEN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 INSPEKTORAT
4.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 BPKD
5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 BAPPEDA
6.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
7.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 BPBD
9.	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	KANTOR KESBANG DAN POLITIK	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KANTOR KESBANGPOL
10.	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

OPD | KABAG HUKUM

11.	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS KESEHATAN
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS PU DAN PERA
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DISDUKCAPIL
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
15.	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KOPERASI, UKM, PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP, DAN PA
17.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 SATPOL PP
18.	DINAS KETAHANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS KETAHANAN PANGAN
19.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
20.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
21.	DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS PERIKANAN
22.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS PMP
23.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DLH



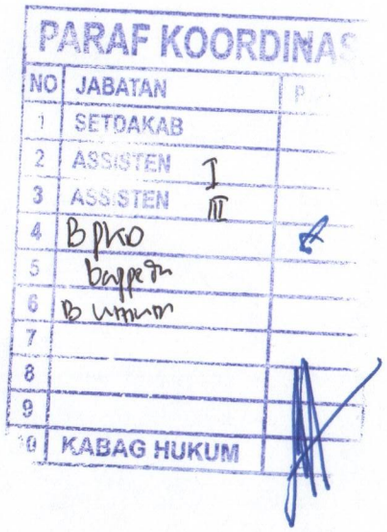
24.	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP, DAN TENAGA KERJA
25.	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS SOSIAL
26.	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DISHUB
27.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DISKOMINFO
28.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
29.	RSUD ALIMUDDIN UMAR	RSUD ALIMUDDIN UMAR	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 RSUD ALIMUDDIN UMAR
30.	KECAMATAN BALIKBUKIT	KECAMATAN BALIKBUKIT	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC BALIKBUKIT
31.	KECAMATAN BELALAU	KECAMATAN BELALAU	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC BELALAU
32.	KECAMATAN SUMBERJAYA	KECAMATAN SUMBERJAYA	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC SUMBERJAYA
33.	KECAMATAN WAYTENONG	KECAMATAN WAYTENONG	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC WAYTENONG
34.	KECAMATAN SEKINCAU	KECAMATAN SEKINCAU	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC SEKINCAU
35.	KECAMATAN SUOH	KECAMATAN SUOH	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC SUOH
36.	KECAMATAN BATUBRAK	KECAMATAN BATUBRAK	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC BATUBRAK
37.	KECAMATAN SUKAU	KECAMATAN SUKAU	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC SUKAU
38.	KECAMATAN GEDUNGSURIAN	KECAMATAN GEDUNGSURIAN	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC GEDUNGSURIAN



39.	KECAMATAN KEBUNTEBU	KECAMATAN KEBUNTEBU	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC KEBUNTEBU,
40.	KECAMATAN AIRHITAM	KECAMATAN AIRHITAM	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC AIRHITAM
41.	KECAMATAN PAGARDEWA	KECAMATAN PAGARDEWA	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC PAGARDEWA
42.	KECAMATAN BATUKETULIS	KECAMATAN BATUKETULIS	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC BATUKETULIS
43.	KECAMATAN BANDARNEGERI SOUH	KECAMATAN BANDAR NEGERI SOUH	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC BANDARNEGERI SOUH
44.	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG	SESUAI DENGAN LBMD (KIB A, B, C, D, E, DAN F) PER 31 DESEMBER 2017 KEC LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS



LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.01/2018
TANGGAL : JANUARI 2018

PENETAPAN STATUS BARANG MILIK DAERAH YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA BUPATI LAMPUNG BARAT

NO.	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	KUANTITAS	HARGA PEROLEHAN (Rp)	OPD ASAL	OPD PENERIMA	KETERANGAN
1.	TUGU SEKUTING	2017	1 UNIT	1.479.978.280,-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	UPT SEKUTING TERPADU (DINAS PUPR	MUTASI ANTAR OPD
2.	TUGU TANI	2017	1 UNIT	349.253.280,-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PUPR	MUTASI ANTAR OPD
3.	KURSI TAMAN	2017	20 UNIT	98.711.000,-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	UPT SEKUTING TERPADU (DINAS PUPR	MUTASI ANTAR OPD
4.	VIDEOTRON	2017	1 UNIT	921.777.941,-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS KOMINFO	MUTASI ANTAR OPD
5.	POS JAGA	2017	1 UNIT	72.376.294,-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS PERHUBUNGAN	MUTASI ANTAR OPD
6.	GEDUNG UJI	2017	1 UNIT	1.059.950.000,-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PEMBANGUNAN
7.	GEDUNG KANTOR	2017	1 UNIT	446.877.000,-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PEMBANGUNAN
8.	PAGAR	2017	150,64 METER	268.208.000,-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PEMBANGUNAN
9.	RPPJ	2017	6 UNIT	94.981.000,-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PEMBANGUNAN
10.	WARNING LIGHT	2017	3 UNIT	145.084.000,-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PEMBANGUNAN
11.	JALAN LAINNYA	2017	224,61 M^3	505.738.000,-	DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PEMBANGUNAN
12.	DERMAGA PARIWISATA	2017	P= 15 m, L= 20 m, 1 (SATU) UNIT	944.444.000,-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	PEMBANGUNAN
13.	KIOS CINDERAMATA	2017	P= 9 m, L= 3 m, 4 (EMPAT) UNIT	754.870.000,-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	PEMBANGUNAN
14.	GARASI JETSKY	2017	P= 4,75 m, L= 2,5 m, 1 (SATU) UNIT	111.450.000,-	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	PEMBANGUNAN
15.	KANTOR KEJAKSAAN NEGERI LIWA	2017		346.735.000,-	DINAS PUPR	KEJAKSAAN NEGERI LIWA	HIBAH BMD
16.	KANTOR KECAMATAN SEKINCAU	2017		694.413.000,-	DINAS PUPR	KECAMATAN SEKINCAU	PERBAIKAN



17.	KANTOR PWI	2017		194.138.000,-	DINAS PUPR	SEKRETARIAT DAERAH	PERBAIKAN
18.	TUGU SEKURA	2017		2.372.553.207,-	DINAS PUPR	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	MUTASI ANTAR OPD
19.	INFRASTRUKTUR PENUNJANG KEBUN RAYA LIWA	2017		2.028.195.000,-	DINAS PUPR	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (UPT KEBUN RAYA LIWA)	MUTASI ANTAR OPD
20.	REST AREA SUMBERJAYA	2016		987.994.000,-	DINAS PUPR	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	MUTASI ANTAR OPD
21.	GEDUNG ARSIP KEJAKSAAN NEGERI LIWA	2016		546.444.000,-	DINAS PUPR	KEJAKSAAN NEGERI LIWA	HIBAH BMD
22.	KANTOR KECAMATAN SUMBERJAYA	2016		769.621.000,-	DINAS PUPR	KECAMATAN SUMBERJAYA	PERBAIKAN
23.	KANTOR BPBD	2016		397.231.000,-	DINAS PUPR	BPBD	PERBAIKAN
24.	RUANGAN OPERATION ROOM KANTOR BUPATI	2016		840.500.000,-	DINAS PUPR	SEKRETARIAT DAERAH	PERBAIKAN
25.	KANTOR KECAMATAN SUOH	2016		842.000.000,-	DINAS PUPR	KECAMATAN SUOH	PERBAIKAN
26.	INSTALASI AIR BERSIH RUMAH DINAS KAJARI	2016		49.485.000,-	DINAS PUPR	KEJAKSAAN NEGERI LIWA	HIBAH BMD

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BPKD	
5	Bagian	
6	B. Umum	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS